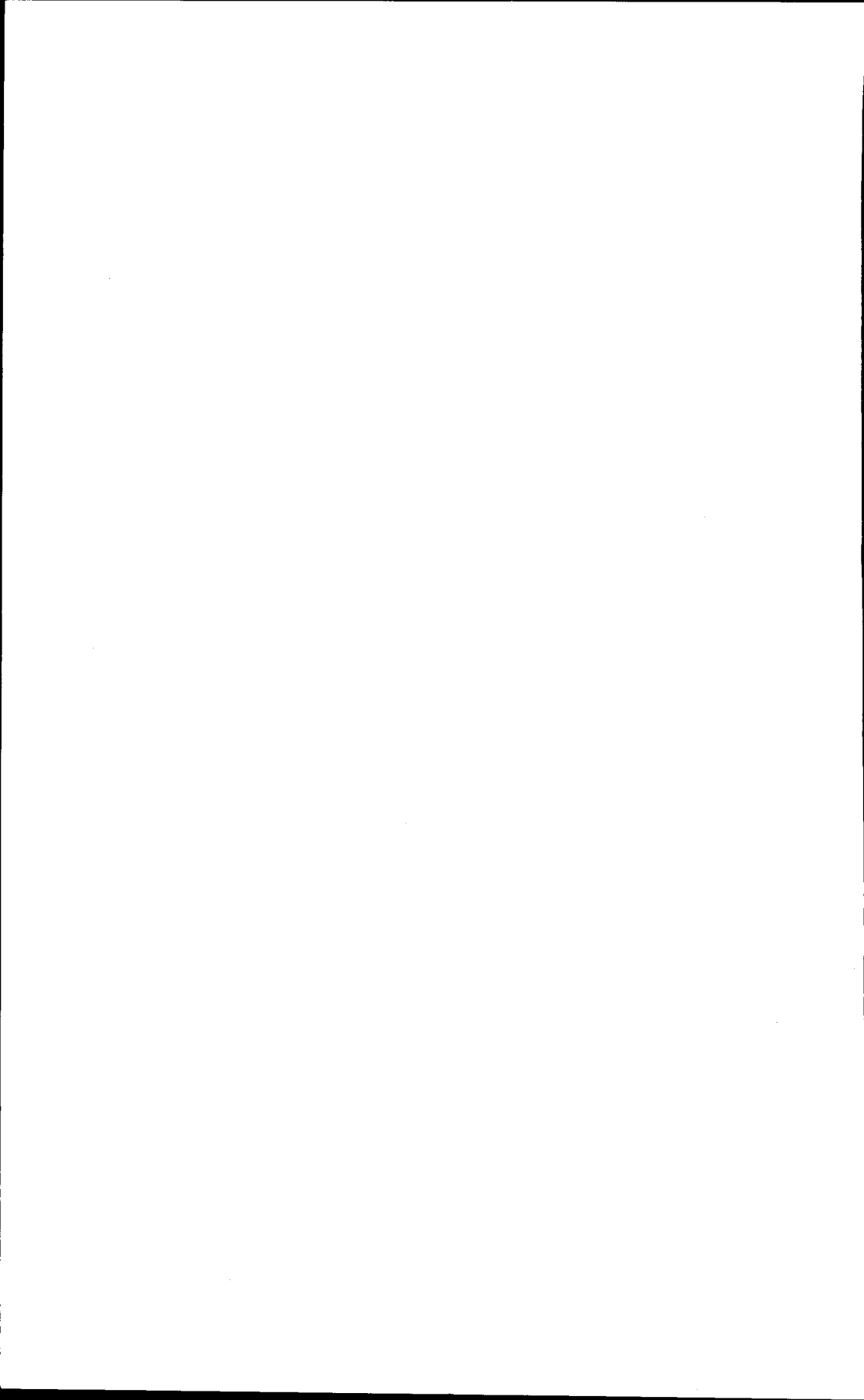


Buku Program Seminar Nasional Pilkada serentak

**Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin
10 November 2015**



**Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar, indonesia
2015**



KATA PENGANTAR

Prosiding ini diterbitkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan hasil penelitian, ide dan gagasan yang telah dikaji dari sisi akademik maupun praktis serta dikompilasi dari karya-karya pemakalah dalam **Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015** yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea pada 10 November 2015. Dalam prosiding ini, makalah yang telah kami seleksi dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain: (1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik dan (4) Politik Dinasti.

Sub tema pertama mengenai demokrasi dan partisipasi publik membahas topik seputar partisipasi politik, dampak politik, permasalahan pilkada serentak dan kanalisasinya, peran media massa, sistem pilkada, implikasi pilkada secara serentak, pergeseran peran Mahkamah Konstitusi, mendulang partisipasi publik hingga ragam bahasa dalam kampanye politik.

Sub tema kedua mengenai dinamika dalam regulasi Pilkada menguraikan topik terkait penyelesaian sengketa pilkada serentak, sistem pemilihan dan rekrutmen politik, penguatan KPU, pasangan calon tunggal, badan peradilan khusus pilkada, independensi lembaga survei, politik transaksional dan implikasinya bagi pemerintah daerah dan netralitas pegawai negeri sipil.

Sub tema ketiga mengenai institusionalisasi partai politik mengkaji tentang eksklusi partai politik dan masa depan politik representasi, kasus hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara, kaderisasi partai politik, hingga party switching di kalangan elit partai. Sub tema keempat mengenai politik dinasti membahas topik politik dinasti dalam kajian konstitusi, membangun politik hukum pilkada yang demokratis, reproduksi status tradisional, patronase dan pengawetan kekuasaan dan isu putra daerah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC

AIPI) Kota Makassar yang telah bekerjasama menyelenggarakan Seminar ini.

Makalah dalam prosiding ini merupakan partisipasi para akademisi dan praktisi dari berbagai penjuru Indonesia, antara lain: Aceh, Bungo (Jambi), Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Maluku Utara, Kendari, Majene, Pangkep, Soppeng dan Makassar. Kami berharap melalui prosiding ini, pembaca dapat memahami berbagai topik-topik yang mengemuka menyongsong Pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2015 mendatang. Terakhir, kami berharap prosiding ini membawa manfaat bagi Indonesia dan kita semua.

Salam Hormat,
Tim Editor

Gustiana A. Kambo & Achmad Zulfikar

SAMBUTAN DEKAN

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksanakan bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

Wassalamu alaikum wr. wb.

Makassar, 10 November 2015

Dekan FISIP UNHAS

Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Dekan	iii
Daftar Isi	iv
Agenda Seminar	viii

TEMA 1. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK

Pilkada, Demokrasi dan Partisipasi Politik

Muhammad Kausar Bailusy	1
-------------------------	---

Dampak Politik Sebelum Pemilukada Di Kabupaten Jeneponto

Armin	2
-------	---

Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya

Muhadam Labolo	4
----------------	---

Media Massa, Pilkada Dan Demokrasi

Andi Alimuddin Unde	6
---------------------	---

Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi

Gustiana A Kambo	7
------------------	---

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada

Adi Suryadi Culla	8
-------------------	---

Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi

Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur	9
------------------------------------	---

Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal

Bisariyadi	10
------------	----

Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia

Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin	11
-----------------------------------	----

Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak

Siti Malikhatun Badriyah	12
--------------------------	----

Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas	
Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti	13
Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo	
Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya	15
Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak	
Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud	17
Blusukan sebagai <i>New Culture</i> Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia	
Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan	18
Motivasi Mantan Keuchik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen	
Effendi Hasan dan Faroq Al Anbari	20
Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada	
Rahman Hasim dan Hendry Bakri	21
 TEMA 2. REGULASI PILKADA	
Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif <i>Electoral Justice System</i>	
Bambang Eka Cahya Widodo	22
Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak	
Jayadi Nas	23
Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu	
Dian Aulia	24
Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015	
Firman Manan	26
Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada	
Fajar L. Soeroso	28

Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014

Nuzul Qur'aini Mardiyah 29

Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

Ratnia Solihah dan Siti Witianti 31

Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015

Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty 32

TEMA 3. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK

Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi

Caroline Paskarina 34

Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara

Eka Suaib 36

Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene

Muhammad 38

Institusionalisasi Partai Politik

Rusdianto Sudirman 40

Dampak Party Switching terhadap Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Andi Ali Armunanto 42

TEMA 4. POLITIK DINASTI

Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan MK

Lita Tyesta Addy Listya Wardhani 43

Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015

Anna Triningsih 45

**Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik
di Kabupaten Wajo**

Munauwarah dan A. M. Yusuf

46

Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan

Syarifuddin Jurdi

47

**AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, 10 November 2015**

Waktu	Aktivitas	Ruangan
08.00-09.00	Registrasi	Gd. IPTEKS
	Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan	Gd. IPTEKS
09.00-10.00	Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 <i>Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie</i> (Ketua DKPPRI) Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015	Gd. IPTEKS
10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Lobi Gd. IPTEKS
10.15-13.00	Sesi Panel Husni Kamil Manik Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin, M.Si. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. Moderator : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	Gd. IPTEKS
13.00-14.00	ISHOMA	
	Sesi Paralel 1	
14.00-15.00	Kelompok 1 1. Andi Alimuddin Unde (Universitas Hasa- nuddin) Media Massa, Pilkada dan Demokrasi 2. Fajar L.Soeroso (Mahkamah Konstitusi RI) Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khu- sus Pilkada	Ruang A/ Rg. Utama

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>3. Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin) Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak</p> <p>4. Eka Suaib (Universitas Halu Oleo) Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara</p> <p>5. Caroline Paskarina (Universitas Padjadjaran) Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi</p> <p>6. Firman Manan (Universitas Padjadjaran) Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>Moderator: Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.</p>	
14.00-15.00	<p>Kelompok 2</p> <p>1. Muhadam Labolo (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya</p> <p>2. Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muara Bungo) Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo</p> <p>3. Nuzul Qur'aini Mardiya (Mahkamah Konstitusi RI) Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014</p> <p>4. Gustiana A. Kambo (Universitas Hasanuddin) Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi</p> <p>5. Sitti Rabiha dan Nurfathana Mazhud (Universitas Muslim Indonesia) Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak</p>	Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Andi Ali Armunanto (Universitas Hasanuddin) Party Switching di Kalangan Elit Partai</p> <p>7. Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin Makassar) Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan</p> <p>8. Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur (Universitas Hasanuddin dan Redaksi Majalah Suara Gubernur) Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi</p> <p>9. Siti Malikhatun Badriyah (Universitas Diponegoro) Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak</p> <p>Moderator: Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.</p>	
14.00-15.00	<p>Kelompok 3</p> <p>1. Rusdianto Sudirman (Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kab. Soppeng) Institusionalisasi Partai Politik</p> <p>2. Muhammad (Universitas Sulawesi Barat) Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene</p> <p>4. Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin (Universitas Hasanuddin dan UIN Ar-Raniry) Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia</p> <p>5. Bisariyadi (Mahkamah Konstitusi RI) Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal</p>	Rg. Rapat Senat FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. Effendi Hasan, Taufik Abdullah dan Faroq Al Anbari (Unsyiah Banda Aceh dan Unimal Lhoksumawe) Motivasi Mantan Geusiyik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen</p> <p>6. Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada) Blusukan sebagai New Culture Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</p> <p>7. Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara) Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>8. Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin) Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</p>	
15.00-16.00	<p style="text-align: center;">Sesi Paralel 2</p> <p>Kelompok 4</p> <p>1. Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPI) Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu</p> <p>2. Anna Triningsih (Mahkamah Konstitusi RI) Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015</p> <p>3. Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin) Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak</p>	Gd. IPTEKS

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>4. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro) Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</p> <p>5. Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran) Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia</p> <p>6. Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas</p> <p>Moderator: Muhammad Nasir Badu, Ph.D</p>	
16.00-16.30	<p>Penutupan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	Gd. IPTEKS

PILKADA, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusy

Prof. Dr. M.A., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 2015 ini, Indonesia sedang menjalankan era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan pilkada melalui sudut pandang demokrasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politik terhadap penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

DAMPAK POLITIK SEBELUM PILKADA

DI KABUPATEN JENEPONTO

Armin

Prof. Dr., M.Si. Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,
Makassar.

Abstrak

Tulisan berfokus pada dampak politik sebelum pemilukada di Kabupaten Jeneponto. Ada 2 aspek yang diuraikan yaitu, Pertama, dampak positif sebelum pemilukada. Kedua, dampak negative sebelum pemilukada. Dampak positif sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mendukung kepemimpinan Bupati Radjamilo. Selama 10 tahun Radjamilo memimpin Birokrasi dan SKPD sehingga para pejabat yang loyal kepadanya dimanfaatkan untuk mensukseskan anaknya menjadi Bupati Jeneponto menggantikan dirinya. Para Birokrat itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan konsolidasi, dan penggalangan massa persiapan kemenangan pasangan Mantap pada pemilu kada 2013. Demikian juga tokoh masyarakat yang mendukung Radjamilo dan anaknya mendapat kemudahan menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya. Tokoh masyarakat itu dimanfaatkan untuk menggalang massa di masyarakat. Tokoh masyarakat juga bekerja sama dengan SKPD melakukan penggalangan melalui program yang pro rakyat. Masyarakat yang mendukung pasangan Mantap mendapat prioritas untuk memperoleh jatah dalam pembagian pupuk, bibit jagung, benih udang, bandeng, traktor dan berbagai program kerakyatan lainnya. Dampak negatif sebelum pemilukada dirasakan oleh birokrat yang dinilai tidak loyal oleh Radjamilo, dimutasi pada jabatan yang kurang disenangi, bahkan tidak sedikit diantaranya nonjob. Tokoh masyarakat yang tidak dekat dengan Radjamilo juga aspirasinya sulit tersalurkan. Hal itu disebabkan oleh kurang dekatnya sang tokoh kepada Bupati dan anaknya, juga diperparah oleh kebijakan dan program yang dijalankan oleh SKPD yang dinilai diskriminatif oleh tokoh masyarakat dan masyarakat yang tidak mendapat bagian dari program pro rakyat yang dijalankan oleh SKPD. Kondisi itu dimanfaatkan oleh Pasangan Siap yang berusaha merangkul birokrasi, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang kecewa pada kepemimpinan Radjamilo yang mengusung anaknya untuk menggantikan dirinya. Kelompok birokrasi yang dikecewakan oleh bersatu merapatkan barisan dengan tokoh masyarakat, yang juga tidak dekat dengan Radjamilo serta masyarakat yang kecewa dengan kebijakan dan program yang dilancarkan SKPD menjelang pemilukada berangsur. Tokoh masyarakat dan mesyarakat yang melakukan perlawanan atau tidak mendukung kurang mendapat kue pembangunan. Kondisi itulah yang melahirkan akumulasi kekecewaan sehingga melahirkan soliditas yang tinggi dan partisipasi politik otonom dalam pemilukada. Banyak relawan

yang membeli atribut sendiri, membeli makan sendiri, bahkan membangun posko sendiri, guna membangun kekompakan diantara mereka. Kelompok itu merapatkan barisan untuk menggalang massa memenangkan pasangan Siap pada pemilukada 2013.

Kata Kunci: Dampak Politik, Pilkada, Kabupaten Jeneponto

Menemu-Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya

Muhadam Labolo

Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kampus Jakarta. Email: muhadamlabolo@gmail.com

Abstract

Schedule changes of General Election of Regional Heads which is conducted in unison after setting in Law No. 8/2015 raises to various implications. The problems of General Election of Regional Heads in unison when identified can be divided into three main stages, i.e input, process and output. In the input stages, the recruitment of candidate pairs for regional heads dealing with the issue of tightness of the system settings a minimum of two candidates pairs. This conditions created a stagnation for a single candidate pairs without competitors like Blitar, Tasikmalaya and Timor Tengah Utara (TTU). The issue is beyond the enrollment technical mechanisms in some cases creating local scale tensions. In the process stages, potency of problem was detected varies starting from mobilization to the massive effort for the vote in order to create a width gap as a juridical foundation for the process of the justice searching by a candidate pairs who felt "tricked" or even lose out in real. While in output stages, risk to low of electors acceptability for the candidate pairs so that could potentially degrade the legitimacy of the elected pairs. With the argument that the General Election of Regional Heads in unison built on the principles of efficiency and effectiveness, it seems in addition to snatch half the quality of democracy, also showed a paradox tendency with the main of efficiency and effectiveness. These symptoms may require a number of strategies as canalization of the various issues that arise in half the time 'match', so even though the efficiency and effectiveness of the regional head elections is not revealing the results, but the quality of democracy is not entirely lost useless. This paper will identified a number of major problems in General Election of Regional Heads in unison and at the same time trying to throw some ideas for canalization effort to save democracy at grass root level while controlling expenses as much as possible for the purpose of being more principals.

Keywords: *General Election of Regional Heads in unison, Issues of Input, Process, and Output*

Abstrak

Perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015 menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pemilukada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga tahapan pokok yaitu, tahapan input, proses dan output. Pada tahapan *input*, rekrutmen pasangan kandidat kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatnya pengaturan

sistem terhadap minimal dua pasangan calon. Kondisi ini melahirkan stagnasi bagi pasangan tunggal tanpa kompetitor seperti Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara (TTU). Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan *proses*, potensi masalah terdeteksi bervariasi mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa “diakali” atau bahkan kalah yang sesungguhnya. Sedangkan tahapan *output* beresiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pemilu serentak dibangun diatas prinsip efisiensi dan efektivitas, tampaknya selain dapat merenggut separuh kualitas demokrasi, juga memeperlihatkan kecenderungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu ‘pertandingan’, sehingga sungguhpun efisiensi dan efektivitas Pemilu serentak tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya hilang percuma. Tulisan ini akan menemu-kenali sejumlah problem utama dalam Pemilu serentak sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level *grass root* seraya mengendalikan pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih pokok.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Problem Input, Proses dan Output.

MEDIA MASSA, PILKADA DAN DEMOKRASI

Andi Alimuddin Unde

Prof., Dr., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.

Email: undealimuddin@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini memaparkan Hubungan antara media massa, pilkada dan demokrasi saat ini. Media massa berperan melaksanakan fungsinya seperti fungsi informatif, fungsi menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta koreksi yang konstruktif. Media di Indonesia dituntut untuk meningkatkan sikap yang sehat kepada masyarakat, fair, jujur, dan bertanggung jawab terhadap pemberitaannya terutama dalam perannya mendemokrasiakan pemilihan kepala daerah. Namun, pada kenyataannya, media massa belum sanggup menggapai kondisi yang demokratis dalam melaksanakan fungsi informasi dan fungsi-fungsi lain serta hak-haknya. Hal ini dapat dilihat pada meluasnya berbagai protes terhadap hasil pemilihan kepala daerah, saat media giat memperjuangkan terlaksananya demokratisasi informasi atau transparansi berita. Pelaksanaan semua fungsi media massa untuk membangun demokrasi memiliki beberapa hambatan. Budaya komunikasi bangsa yang berciri tertutup terutama di pedesaan yang memberi peluang besar bagi tertutupnya para penguasa desa dan panitia pendaftaran pemilih serta ketakutan penduduk desa untuk buka mulut. Selain itu, para petugas pemilu yang melakukan kecurangan belum tentu peka terhadap control dan kritik media massa. Pada akhirnya, media massa yang tentu ingin berpartisipasi dalam demokrasi tetap perlu memelihara sifat objektif, fair, independen, taat terhadap kode etik jurnalistik dan hukum media massa yang berlaku.

Kata Kunci: Media Massa, Pilkada, Demokrasi

MEMAHAMI SISTEM PILKADA DALAM PENGUATAN DEMOKRASI

Gustiana A. Kambo¹

Dr., S.IP., M.Si., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: gustianakambo@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menggambarkan pemahaman tentang plkada langsung dan serentak dengan segala kelamahan dan kelebihanannya. Sistem yang ada ini tidak hanya diperuntukkan pada efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dalam penyiapan budaya politik yang memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas penyelenggara negara yang di dukung oleh rakyat dalam menjamin pemerintahan yang demokratis.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Sistem Pilkada, Legitimasi, Demokrasi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PILKADA

Adi Suryadi Culla

Dr., M.A. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin; Dosen Pascasarjana Ilmu Politik; Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan.

Abstrak

Pemilihan yang demokratis merupakan prasyarat negara demokrasi. Indonesia telah melalui berbagai pemilihan umum di masa orde lama, orde baru hingga reformasi. Saat ini, Indonesia telah melangkah pada tahapan yang lebih tinggi yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Salah satu aspek yang menarik dikadi dari proses pilkada ini yakni aspek pengawasan. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pemilu, yakni BAWASLU di tingkat pusat dan provinsi, sedangkan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota dianggap belum mampu untuk mengawasi secara detil proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi BAWASLU dengan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif. Di samping itu, perlu juga dilakukan pemetaan titik rawan pengawasan pemilu/pilkada agar dapat pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, Pilkada

IMPLIKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA SERENTAK TERHADAP ASPEK SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI

Achmad Zulfikar¹ dan Baharuddin Nur²

¹ S.IP., Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: apa@kabarfikar.com

² Ir., Dipl. Env. Wakil Pemimpin Umum Majalah Suara Gubernur.

Email: ben@suaragubernur.com

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah antitesa dari pengangkatan kepala daerah yang telah berlangsung cukup lama, setidaknya hampir usia dengan orde lama ditambah orde baru atau sekitar 50 tahun dari 70 tahun usia pemerintahan kita. Diangkat dan dipilih adalah dua hal yang berbeda. Dipilih tentu saja lebih demokratis daripada diangkat. Dipilih merupakan hasil dari sejumlah alternatif, sementara diangkat lebih terkesan suatu pilihan yang datang dari atas (*top down*). Pilkada merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk memastikan Kepala Daerah berasal dari pilihan rakyat, bukan penunjukan dari pejabat atau kekuasaan di atasnya. Lazimnya, Pilkada berlangsung sesuai dengan penanggalan kegiatan politik setiap daerah, dimana batas masa tugas lima tahun dijadikan sebagai patokan untuk dilaksanakannya Pilkada lagi. Namun pada 9 Desember 2015 ini penanggalan itu mengalami perubahan atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pilkada ke depan. Oleh karenanya, Pilkada yang akan berlangsung di Indonesia ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah dilakukan di negeri ini, bahkan di dunia. Dalam makalah ini, penulis tertantang untuk menelaah bagaimana kemungkinan yang akan timbul sebagai implikasi Pilkada serentak ini terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Pilkada Serentak, Sosial, Politik, Ekonomi